



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024



URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, kami bisa menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2024 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tepat waktu sesuai dengan rencana.

Penyusunan LKPJ ini dilaksanakan untuk memenuhi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Tujuan dari penyusunan LKPJ ini adalah untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program dan kegiatan pada tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dalam hal ini merupakan bahan dasar dari LKPJ Walikota Semarang yang akan disampaikan dihadapan DPRD Kota Semarang.

Kami menyadari apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 belum dapat memenuhi harapan semua pihak, meski demikian kami akan terus bekerja keras merealisasikan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dukungan, masukan maupun kritikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami butuhkan agar ke depan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang kami bisa tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2024 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 21 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



dr. Nongroho Edy Rijanto, M.Kes.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Prof. Soedarto Nomor 70, Sumurboto, Banyumanik 50269
Telepon (024) 7640225, Posel dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
NIP : 197110202002121006
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tingkat I/IVb
JABATAN : Plt. Kepala Dinas

Telah membaca, menyetujui serta bersedia bertanggung jawab atas isi dan data dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan bidang tugas Perangkat Daerah kami.

Semarang, 21 Februari 2025

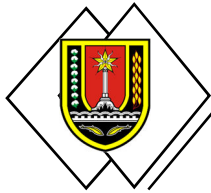
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 197110202002121006



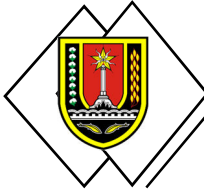
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. KEBIJAKAN PROGRAM

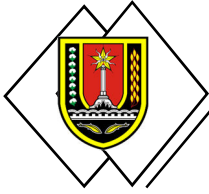
Kebijakan Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada (1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (2) Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya; (3) Peningkatan sinergitas dan kerjasama dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) Peningkatan perlindungan hak perempuan; dan (5) Peningkatan perlindungan khusus anak.

Adapun Program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini diarahkan untuk penyusunan dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini diarahkan untuk kinerja administrasi dan pelaporan keuangan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan sumber daya aparatur. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan administrasi umum. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan kebutuhan jasa kantor. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk pemeliharaan aset milik dinas. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;

Program ini diarahkan pada cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

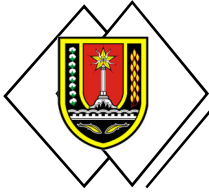
Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan program dan kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG.

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk pendampingan peningkatan partisipasi perempuan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.



c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk Lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan untuk mengurangi rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

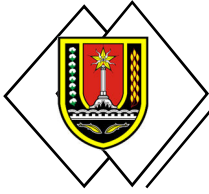
Kegiatan ini diarahkan untuk rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

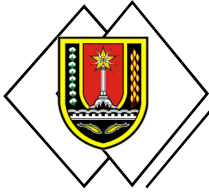
b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk Lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

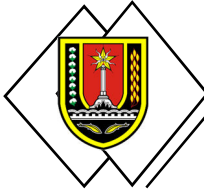
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.



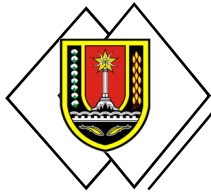
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan untuk Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan kualitas keluarga. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;



- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diarahkan untuk pemberdayaan berbasis kesetaraan gender. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Program ini diarahkan untuk cakupan pengelolaan system data gender dan anak dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk KIE gender dan anak. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan untuk cakupan pemenuhan hak anak dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk jejaring kemitraan lembaga PHA. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk lembaga layanan anak yang telah memiliki SPM. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Program Perlindungan Khusus Anak
- Program ini diarahkan untuk anak korban kekerasan yang ditangani dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk kegiatan lintas sector pencegahan kekerasan terhadap anak. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA.
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota.



B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

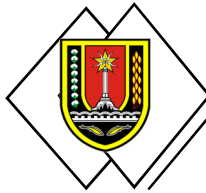
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebesar :

(NAMA OPD)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.122.583.411	20.177.879.939	91,21%
JUMLAH	22.122.583.411	20.177.879.939	91,21%

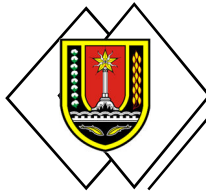
Capaian realisasi keuangan pada tahun 2024 adalah 91,21% atau Rp 20.177.879.939,- dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 22.122.583.411,-.

Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

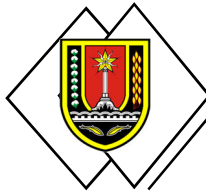
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		22.122.583.411	20.177.879.939	91,21%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.291.031.183	12.441.555.829	93,61%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.438.600	62.248.000	92,30%
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.033.000	30.813.600	96,19%
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.586.000	1.542.400	59,64%
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.036.000	1.592.000	52,44%
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.379.200	1.359.900	98,60%
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.012.000	1.012.000	100,00%
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.496.000	3.743.800	83,27%
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.896.400	22.184.300	96,89%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.408.991.345	8.847.455.155	94,03%
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.162.403.000	8.620.537.655	94,09%
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.578.745	223.310.000	92,06%
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.124.000	1.123.500	99,96%
0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000	750.000	100,00%
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.573.600	1.179.000	74,92%
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	562.000	555.000	98,75%



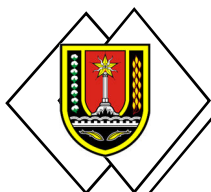
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.210.046	329.826.450	90,31%
0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	230.955.596	200.898.000	86,99%
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134.254.450	128.928.450	96,03%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.165.639	867.554.924	90,64%
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.300	4.855.000	90,66%
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.744.560	20.620.000	90,66%
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.997.620	29.994.109	99,99%
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.365.502	47.417.500	79,87%
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.375.425	9.659.545	38,07%
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000	20.691.000	43,11%
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.340.922	458.517.770	95,26%
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	284.986.310	275.800.000	96,78%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.151.408.449	1.121.990.000	97,45%
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	508.598.739	497.700.000	97,86%
0005	Pengadaan Mebel	377.877.930	370.463.000	98,04%
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.907.700	195.292.000	97,20%
0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.024.080	58.535.000	91,43%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.621.812	511.296.753	94,75%
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.024.000	134.987.261	84,88%
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.597.812	376.309.492	98,87%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.195.292	701.184.547	87,52%
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	38.724.411	97,03%
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.466.160	278.419.553	74,55%
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.390.566	43.336.582	99,88%
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	329.835.425	327.906.351	99,42%
0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.593.091	12.797.650	87,70%
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.493.250.884	1.311.181.168	87,81%
2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	172.297.248	131.715.780	76,45%



Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.766.450	12.502.500	37,03%
0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	32.197.810	22.867.000	71,02%
0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70.029.658	65.707.780	93,83%
0004	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	36.303.330	30.638.500	84,40%
2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	499.347.212	426.984.700	85,51%
0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	118.278.642	91.060.500	76,99%
0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	381.068.570	335.924.200	88,15%
2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	821.606.424	752.480.688	91,59%
0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	527.198.578	497.158.951	94,30%
0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	159.789.028	138.037.811	86,39%
0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.618.818	117.283.926	87,12%
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.709.814.502	2.267.479.238	83,68%
2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	828.376.512	745.814.749	90,03%
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	590.371.412	545.868.800	92,46%
0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	238.005.100	199.945.949	84,01%
2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.345.591.625	1.105.263.139	82,14%
0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.207.071.625	1.055.219.869	87,42%
0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	138.520.000	50.043.270	36,13%
2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	535.846.365	416.401.350	77,71%
0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	223.704.590	177.979.500	79,56%
0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.480.475	53.364.000	92,84%



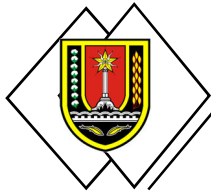
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	88.673.820	39.485.500	44,53%
0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	165.987.480	145.572.350	87,70%
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.541.698.720	2.351.276.116	92,51%
2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.048.291.580	1.898.191.616	92,67%
0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	331.482.260	291.334.800	87,89%
0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90.697.200	78.015.200	86,02%
0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.626.112.120	1.528.841.616	94,02%
2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.551.180	430.735.500	91,54%
0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.217.800	68.450.500	93,49%
0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.887.880	339.354.000	90,76%
0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.445.500	22.931.000	97,81%
2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.855.960	22.349.000	97,78%
0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.855.960	22.349.000	97,78%
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	246.319.980	232.477.515	94,38%
2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246.319.980	232.477.515	94,38%
0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	84.439.140	79.311.875	93,93%
0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	161.880.840	153.165.640	94,62%
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.667.108.926	1.468.090.360	88,06%
2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	390.185.096	356.256.800	91,30%



Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	43.100.000	32.738.800	75,96%
0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	347.085.096	323.518.000	93,21%
2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.276.923.830	1.111.833.560	87,07%
0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	775.324.590	676.170.160	87,21%
0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.580.000	134.891.000	87,83%
0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.806.530	139.558.400	84,68%
0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183.212.710	161.214.000	87,99%
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	173.359.216	105.819.713	61,04%
2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.250.000	47.735.000	87,99%
0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	54.250.000	47.735.000	87,99%
2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.960.000	39.683.913	40,93%
0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	96.960.000	39.683.913	40,93%
2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.149.216	18.400.800	83,08%
0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	22.149.216	18.400.800	83,08%
		22.122.583.411	20.177.879.939	91,21%

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 75% antara lain:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya paparan di Komisi D, sehingga jumlah fotokopi yang digandakan hanya untuk Internal DP3A;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya paparan di Komisi D, sehingga jumlah fotokopi yang digandakan hanya untuk Internal DP3A;



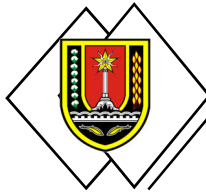
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan hal ini disebabkan karena efisiensi kebutuhan cetak kantor;
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu hal ini disebabkan karena efisiensi jamuan tamu kunjungan dengan memilih salah satu antara makan dos atau snack dos;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG hal ini disebabkan karena efisiensi kegiatan;
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena kegiatan berupa desk asistensi untuk pengisian APE, untuk narasumber tidak hadir;
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena penanganan kasus untuk pemeriksaan jasa kesehatan (visum dll.) tidak berbayar karena melalui Rumah Sakit Pemerintah dan sewa gedung shelter menyesuaikan harga pasar.

2. HASIL YANG DICAPAI

Capaian pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
	TARGET	REALISASI	%	
1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,80	48,90	626,92	48,90
2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0,011	0,024	218,18	0,027
3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,84	28,73	223,75	24,98
4 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100,00	100
5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,71	73,86	98,86	73,93
6 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	71,36	107,57	71,80
7 Rasio KDRT	0,023	0,031	134,78	0,025

Pada tabel diatas capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD masih menggunakan realisasi Tahun 2023 dikarenakan data ARG se Kota Semarang Tahun 2024 sedang di collect oleh Bappeda Kota Semarang.



Adapun untuk capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 0,024% dengan perhitungan sebagai berikut

Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani
----- x 100% (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)
Jumlah anak (Usia 0-19 th)

$$= \frac{121 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 01-01-2024 s.d. 31-12-2024)}}{495.951 \text{ (sumber : disdukcapil, s.d. semester 2 2024)}} \times 100\%$$

= **0,024%**

Hal ini menurun sebesar 0,003% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 0,027%. Dengan penurunan tersebut semua anak korban kekerasan pada tahun 2024 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.

Untuk indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO mengalami kenaikan di tahun 2024 dengan jumlah sebesar 28,73 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan
----- x 100.000 (DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020)
Jumlah penduduk perempuan

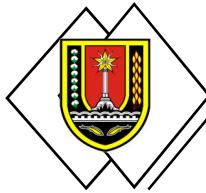
$$= \frac{247 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 01-01-2024 s.d. 31-12-2024)}}{859.642 \text{ (sumber : disdukcapil, s.d. semester 2 2024)}} \times 100.000$$

= **28,73**

Hal ini naik sebesar 3,75 dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 24,98. Dengan kenaikan tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indikator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 73,86. Angka tersebut merupakan capaian IDG Kota Semarang Tahun 2023. Nilai IDG Kota Semarang tahun 2024 akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Juni 2025.

Dan untuk capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebesar 71,36. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2023. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2024 akan dirilis oleh KemenPPPA dan BPS sekitar bulan November 2025.



Adapun untuk indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2024 adalah terealisasi sebesar 0,031% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{143 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 01-01-2024 s.d. 31-12-2024)}}{453.806 \text{ (sumber : disdaldukkb, 2024)}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,031\%}$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus korban KDRT (0,031%). Namun demikian kasus KDRT pada tahun 2024 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).

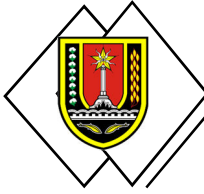
1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI
	TARGET	REALISASI	%	2023
Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A (%)	100%	100%	100	100%
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A (%)	100%	100%	100	100%
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100%	100%	100	100%

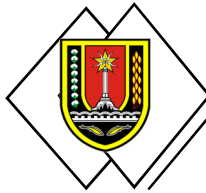
Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Tersusunnya Dokumen Perencanaan;
- Tersusunnya Dokumen RKA Murni;
- Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan;
- Tersusunnya Dokumen DPA Murni;
- Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan;
- Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja;
- Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja;
- Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN;
- Terpenuhinya Honor PA, KPA, PPK dan Bendahara;



- j. Tersusunnya Laporan Akhir Tahun;
- k. Tersusunnya Dokumen Pemeriksaan;
- l. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran;
- m. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan;
- n. Tersusunnya Laporan Prognosis;
- o. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM;
- p. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai;
- q. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik;
- r. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- s. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga;
- t. Tersedianya ATK, Makan dan Minum OPD;
- u. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan;
- v. Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu;
- w. Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Rakor PPPA, Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
- x. Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE;
- y. Tersedianya Mebel Kantor
- z. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor;
- aa. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor;
- bb. Terpenuhinya Langganan Telepon, Listrik, Air, dan Internet;
- cc. Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- dd. Tersedianya BBM dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Jabatan;
- ee. Tersedianya BBM dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas;
- ff. Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor;
- gg. Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor;
- hh. Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor.



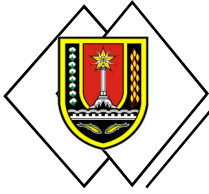
2) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
	TARGET	REALISASI	%	
1. Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan (%)	100%	100%	100	100%

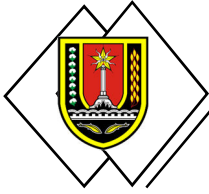
Pada tahun 2024 realisasi kinerja cakupan PUG dan pemberdayaan perempuan berhasil mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian 2023 yang juga sebesar 100%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pembahasan Ranperwal Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 di Ruang Rapat DP3A dengan peserta 35 orang dari DP3A, UPTD PPA, DLH, Dinkop, Bagian Hukum, Dinsos, dan Disdalduk KB;
 - Pembahasan Ranperwal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lanjutan) dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Gedung PKK Lantai 2 dengan peserta 30 orang dari Dinas Terkait, DP3A, Direktur LRC KJ HAM, LBH APIK, LBH SUMMIT, IPPI KALANDRA, PKBI, HWDI, WALHI;
 - Pembahasan Ranperwal tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 di Bagian Hukum dengan peserta 35 orang dari DP3A, Bagian Hukum, dan UPTD PPA.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kapasitas Focal Point & Evaluasi PUG Dalam Mewujudkan Program Pembangunan Responsif Gender Di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Hotel Up Peak dengan peserta 77 orang dari perencanaan OPD se-Kota Semarang.

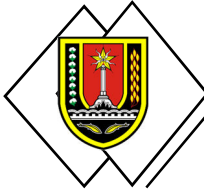


- c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penguatan PUG di OPD (Disdalduk KB) dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 di Pendopo Disdalduk KB dengan peserta 35 orang dari Pejabat Struktural di Dinas Pengendalian Penduduk;
 - Penguatan PUG di OPD (Dinas Pertanian) dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 di Ruang Rapat Dinas Pertanian dengan peserta 35 orang dari Pejabat Struktural di Dinas Pertanian;
 - Penguatan PUG di OPD (Dinas Arpus) dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 di Ruang Rapat Dinas Arpus dengan peserta 35 orang dari Pejabat Struktural di Dinas Arpus;
 - Penguatan PUG di OPD (Kecamatan Tembalang) dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 di Ruang Rapat Kecamatan Tembalang dengan peserta 35 orang dari Pejabat Struktural di Kecamatan Tembalang;
- d. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan kegiatan sebagai berikut :
- FGD Refleksi Keterwakilan Perempuan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 di Balai Kelurahan Plombokan dengan peserta 50 orang dari Masyarakat;
 - Rakor Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 di Rumah Makan Griya Kusuma Ratih dengan peserta 60 orang dari Permata Hebat se Kota Semarang;
 - Forum Diskusi Konstruktif bagi Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 di Gedung PKK Lantai 3 dengan peserta 90 orang dari Anggota GOW dan DP3A;
 - FGD Refleksi Gerakan Perempuan Menuju Indonesia Berkeadilan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 di Gedung Juang dengan peserta 90 orang dari Organisasi Wanita, FKKKG Kota Semarang, Puspa Kota Semarang, Media Sapa, UPTD Kota Semarang, Anantaka Kota Semarang, LBH Apik, LRC Kjham, YKKS, Centre Trauma Recovery Unika, IPPNU, Fatayat Kota Semarang, Satgas Penecagahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USM, Satgas Penecagahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNIMUS, Satgas Penecagahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UDINUS, Satgas



Penecagahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Binus University, Permata Hebat, Bidang PHA pada DP3A Kota Semarang, Sekretariat pada DP3A Kota Semarang, Bidang PPA pada DP3A Kota Semarang, Bidang Permasdatin pada DP3A Kota Semarang, Bidang PPPUG pada DP3A Kota Semarang.

- e. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan kegiatan sebagai berikut :
- FGD Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gedung PKK Lantai 3 dengan peserta 70 orang dari Anggota Parpol, FKKG, PUSPA, GOW, DP3A, dan UPTD PPA;
 - FGD Sinergitas Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan melalui Forum PUSPA dan FKKG di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2024 di Gedung PKK lantai 3 dengan peserta 50 orang dari Anggota FKKG Kota Semarang dan PUSPA Kota Semarang;
 - Membangun Generasi Tangguh Melalui Kesetaraan Gender dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 di Gedung PKK Lantai 3 dengan peserta 60 orang dari IPPNU, NA Aisyah Kota Semarang, Fatayat Kota Semarang, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Semarang, Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Dema Fuhum UIN Walisongo, Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah UPGRIS, Forum Genre Kota Semarang, Forum Anak Kota Semarang, Karang Taruna Kota Semarang, Karang Taruna Kelurahan Wonodri, Karang Taruna Kelurahan Tanjungmas, Centre Trauma Recovery Unika, Yayasan Roemah Difabel Indonesia, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Polines, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USM, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNIMUS, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UDINUS, Psikologi UNDIP, TSA Undip, dan Anantaka;
 - FGD Advokasi Perempuan di Bidang Politik, Sosial, dan Ekonomi untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 di Hotel Up Peak dengan peserta 105 orang dari masyarakat dan anggota GOW.

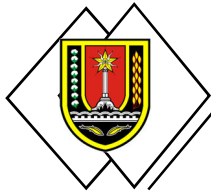


f. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Hampers Parcel dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Gedung Arpus Provinsi Jawa Tengah diikuti 80 anggota LPLPP;
- Pelatihan Table Manner dan Etika Berkomunikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 di Hotel Plaza diikuti 100 anggota LPLPP;
- Lomba Nembang Dolanan Berbahasa Jawa Untuk Anak TK Pertiwi dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 di Galeri Industri Kreatif Kota Lama diikuti 200 peserta;
- Pelatihan Kreasi Pengharum Ruangan Berbahan Dasar Sabun dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 di Ruang Komisi AB diikuti 80 anggota LPLPP;
- Pelatihan Merias Wajah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024 di Aula Gedung PKK Lantai 3 diikuti 45 peserta;
- Jalan Sehat GOPTKI dalam Rangka Hari Jadi Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024 diikuti oleh 500 Guru PAUD;
- Lomba Tari Semarang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024 di Panggung Utama Tri Lomba Juang diikuti 100 peserta;
- Pelatihan Membuat Kue Lebaran dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 di Aula Kelurahan Tambakrejo diikuti 60 peserta;
- Pelatihan Publik Speaking dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 diikuti oleh 100 Guru PAUD;
- Pelatihan Membuat Konten Youtube/ Pelatihan E-commerce dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 di Aula Gedung PKK Lantai 3 diikuti 45 peserta;
- HUT GOW Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 di Aula Gedung PKK Lantai 3 diikuti 120 orang.

g. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- HUT DWP Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 di Pasar Modern BSB Mijen diikuti oleh 1.000 peserta.



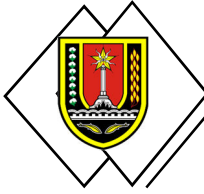
- h. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pembelajaran Sekolah Perempuan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juni 2024 dan 4-5 Juli 2024 diikuti oleh 40 peserta;
 - Akselerasi Pendidikan Politik dan Hukum bagi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan yang Berprespektif Gender dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 dan 25 Juni 2024 diikuti oleh 400 peserta;
 - Workshop Temu Bisnis Pelaku Usaha Mikro Perempuan Kota Semarang dilaksanakan 7 dan 21 Agustus 2024 dan 10 dan 19 September 2024 diikuti 80 peserta.
- i. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
- FGD Peran Perempuan dan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 diikuti 45 peserta;
 - Workshop Perempuan dan Respon yang Sensitif Gender Terhadap Perubahan Iklim dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 diikuti 50 peserta.

3) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	12,84	28,73	223,75	24,98

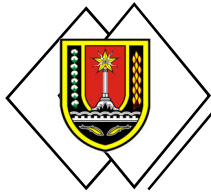
Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil menangani 247 (dua ratus empat puluh tujuh) perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan memberi layanan komprehensif melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 realisasi capaian adalah sebesar 28,73. Hal ini meningkat dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 24,98, yang menunjukkan bahwa rasio kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 3,75.



Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 di Hotel New Puri Garden Semarang diikuti 60 peserta;
 - Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 di Ruang Garuda Hotel Dalu diikuti 60 peserta;
 - Pencegahan Eksploitasi Seksual Pada Anak di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 di Larasati Hotel New diikuti 65 peserta;
 - Pencegahan Cyberbullying dan Pendidikan Konselor Teman Sebaya dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 di SMP N 7 Semarang diikuti 125 siswa kelas;
 - Edukasi Partisipasi Laki-Laki Dalam Pencegahan KDRT dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Hotel New Puri diikuti 90 peserta.
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak Dalam Situasi Darurat Bagi OPD dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024 di Bougenvil Hotel diikuti 65 peserta;
 - Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 di Hotel Azana diikuti 60 peserta.
- c. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Rapat Penanganan Kasus dan Rakord Lintas Sektor dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 di Ruang Rapat UPTD PPA diikuti oleh 10 peserta.

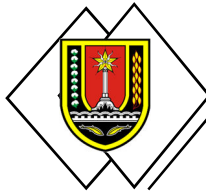


- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Terfasilitasinya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang melalui UPTD PPA Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat Kecamatan melakukan advokasi dan fasilitasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan total kasus sejumlah 266 kasus dan jumlah korban tercatat sejumlah 275 korban.

**RINCIAN KASUS YANG DITANGANI
DP3A KOTA SEMARANG DAN UPTD PPA
TAHUN 2024**

No.	Kasus	2024	
		Jumlah Kasus	Tertangani
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	143	143
2	Kekerasan Dalam Pacaran	3	3
3	Kekerasan Terhadap Anak	91	91
4	Kekerasan Terhadap Perempuan	29	29
5	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	0
	JUMLAH	266	266

- e. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
- FGD Penanganan KTPA di Kecamatan Semarang Utara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Aula Kecamatan Semarang Utara diikuti 30 peserta.
- f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pelatihan Manajemen Kasus dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 di Hotel Grasia diikuti 40 peserta.



- g. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Trauma healing dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 di Gedung PKK diikuti oleh 20 peserta.
- h. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penguatan Jejaring Lembaga Layanan Fasilitasi Garpu Perak dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 di Ruang Astina G3 Hotel diikuti 85 peserta.

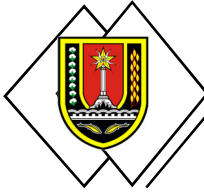
4) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI
	TARGET	REALISASI	%	2023
Persentase lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi (%)	100%	100%	100	100%

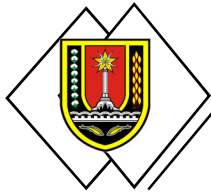
Pada tahun 2024 realisasi kinerja fasilitasi lembaga layanan keluarga berhasil mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan realisasi capaian tahun 2023.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
- Peringatan Hari Kartini ke-145 Tingkat Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 di Atrium Java Super Mall diikuti 400 peserta;
 - Peringatan Hari Ibu ke-96 Tingkat Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 di Pasar Modern BSB Semarang diikuti 525 orang.
- b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pelatihan Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) KRPPA dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 di Gedung PKK Lantai 3 diikuti 230 peserta;



- FGD Implementasi Ketahanan Keluarga dan Program KRPPA dilaksanakan pada 12 Desember 2024 di Hotel Kotta Semarang diikuti 66 peserta.
- c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 di Balai Kelurahan Karanganyar Gunung diikuti oleh 75 peserta;
 - Gebyar 10 Program Pokok PKK dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 di TBRS diikuti 200 peserta;
 - Pelatihan Kewirausahaan Untuk Sahabat Disabilitas dilaksanakan pada tanggal 12 Oktobe 2024 di Rumah Dilan Efata diikuti 50 peserta;
 - Pelatihan Marketing Online dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kampus UMKM Shopee, UMKM Center Jateng diikuti 50 peserta;
 - Kursus Singkat Pasangan Usia Subur (KURSI PUS) dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 di Balai Kelurahan Plombokan diikuti 120 peserta.
- d. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 di Aula Kantor Kecamatan Tembalang diikuti 210 peserta;
 - Peningkatan Implementasi Program KRPPA Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Gedung Juang 45 diikuti 205 peserta.
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pelatihan Penanaman Toga dan Penataan Taman Toga dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 di Balai Kelurahan Pekunden diikuti 75 peserta.



- f. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pembekalan Fasilitator Musrenbang Perempuan dan Anak Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024 di Gedung PKK Lantai 3 diikuti 90 peserta;
 - Keluarga Berkualitas dalam Menuju Indonesia Emas mendukung Program KRPPA dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 di Kantor Kelurahan Sekaran diikuti 35 peserta.
- g. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
- FGD Implementasi Ketahanan Keluarga dan Program KRPPA dilaksanakan pada 17 Januari 2024 di Kantor PKK Kota Semarang Lantai 2 diikuti 45 peserta.

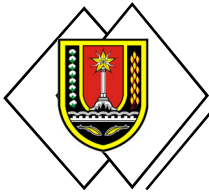
5) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI
	TARGET	REALISASI	%	2023
Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak (%)	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2024 realisasi kinerja cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak berhasil mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota, dengan Kegiatan Sebagai berikut:
- Rakor Sistem Informasi Gender dan Anak dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 di Ruang Rapat DP3A Kota Semarang diikuti 20 peserta;
 - Pembuatan Profil Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024;
 - Penguatan jejaring Sistem Informasi Gender dan Anak dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Aula PUSPAGA diikuti 20 peserta;
 - Pembuatan Profil Gender dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024.



b. Penyajian & Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Peran Media Dalam Advokasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 di Rumah Makan Joglo Besan diikuti 50 peserta;
- Penguatan Media SAPA (Sayang Perempuan dan Anak) dalam Pemberitaan yang Responsif Gender dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 di Rumah Makan Joglo Besan diikuti 50 peserta.

6) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pemenuhan hak anak	100%	100%	100	100%

Pada tahun 2024 realisasi kinerja cakupan pemenuhan hak anak berhasil mencapai target sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

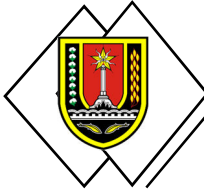
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

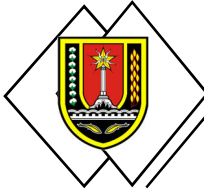
- Penguatan Jejaring KLA Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 di Ruang Pertemuan PUSPAGA Kota Semarang diikuti 60 anggota APSAI;
- Pengembangan SRA di Madrasah (Penguatan Sekber SRA) dilaksanakan pada 10 Oktober 2024 di Ruang Pertemuan Kecamatan Gajahmungkur diikuti 60 peserta;
- Advokasi Jejaring PHA dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Ruang Pertemuan PUSPAGA diikuti 60 peserta.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Lomba Kreasi Anak HAN dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024 di TBRS Semarang diikuti 200 peserta;
- Peringatan HAN dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 di Tugu Dandang Kota Semarang diikuti 500 peserta.



- c. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
- FGD Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Lingkungan yang ramah anak dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 di Balai Kelurahan Bendan Ngisor diikuti 50 peserta;
 - FGD Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Semarang dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 di Hotel Dalu diikuti 80 peserta;
 - FGD Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Lingkungan Keluarga dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 di Ruang Saripetojo Hotel Front One HK Kesambi diikuti 70 peserta.
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penguatan Gugus Tugas dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 di Gedung PKK Kota Semarang diikuti 100 peserta;
 - Pengembangan Gugus Tugas dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024 di Pendopo Disdaldud KB Kota Semarang diikuti 75 peserta.
- e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
- Fasilitasi Forum Anak dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 di Pendopo Disdaldud KB diikuti 50 peserta;
 - BOBS Pencegahan Stunting dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 di SIM Square Tlogorejo diikuti 50 peserta;
 - Desiminasi Informasi Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 di Ruang Pertemuan PUSPAGA diikuti 50 peserta;
 - Jambore Forum Anak dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 di Omah'e Opa Kendal diikuti 75 peserta.
- f. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pelatihan Konvensi Hak Anak dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 di Gedung PKK Lantai 3 diikuti 50 peserta;



- Peningkatan Satuan Pendidikan Ramah Anak Menuju Standarisasi SRA Ramah Anak dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 di Gedung PKK Lantai 3 diikuti 60 peserta;
- Desiminasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Gedung PKK Lantai 3 diikuti 60 peserta.

7) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

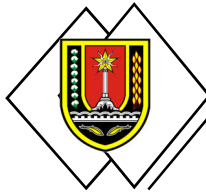
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,011%	0,024%	218,18	0,027%

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil menangani 121 (seratus dua puluh satu) anak korban kekerasan dan semua anak korban kekerasan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2024 realisasi capaian adalah sebesar 0,024%. Hal ini menurun dari realisasi capaian tahun 2023 sebesar 0,027, yang menunjukkan bahwa korban kekerasan pada anak di Kota Semarang mengalami penurunan.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Sosialisasi Disiplin Positif Smp dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Hotel New Puri Garden diikuti 75 peserta.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pendampingan Penanganan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024 di Hotel New Puri Garden diikuti 65 peserta.



C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Masih kurangnya kegiatan untuk menunjang pemberdayaan perempuan yang masih sebatas seremonial dan belum berkelanjutan;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak;
3. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya Ketahanan Keluarga;
4. Masih kurangnya peningkatan kapasitas perempuan di posisi pengambil keputusan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

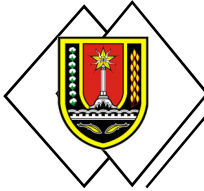
1. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
2. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stake holder;
3. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga di setiap Kelurahan di Kota Semarang;
4. Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015

F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

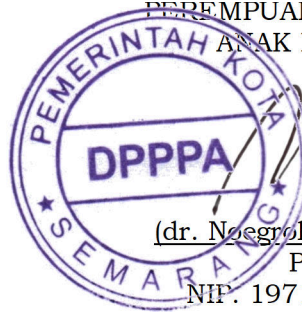
No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembentukan Tempat Penitipan Anak (Daycare) Kota Semarang	Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/0002599	Meningkatkan kualitas hidup anak guna pemenuhan hak anak dalam daerah kabupaten/ kota dan guna menjamin setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, dan pengasuhan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan khususnya bagi anak pekerja/ buruh di Kota Semarang
2	Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode 2022-2025	Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/604 Tahun 2022	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Pembentukan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang	Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 487.12/181 Tahun 2022	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi di bidang kesetaraan dan keadilan gender di Kota Semarang
4	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023	Mendukung aktualisasi diri perempuan dan jaminan perlindungan dalam masyarakat di Kota Semarang



G. REKOMENDASI DPRD

No.	Rekomendasi DPRD pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mengetahui dan menyetujui,
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SEMARANG



(dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes.)
Pembina Tk. I
NIP. 19711020 200212 1 006

**VISUALISASI DATA HASIL - HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Focal Point & Evaluasi PUG Dalam Mewujudkan Program Pembangunan Responsif Gender Di Kota Semarang / Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota



11 Desember 2024 di Hotel Up Peak Semarang

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : HUT DWP / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



7 Desember 2024 di Pasar Modern BSB Mijen

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan / Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



25 Januari 2024 di Hotel New Puri Garden Semarang

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : FGD Penanganan KTPA di Kecamatan Semarang Utara / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota



7 Desember 2024 di Pasar Modern BSB Mijen

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Peringatan Hari Kartini ke-145 Tingkat Kota Semarang / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



23 April 2024 di Atrium Java Super Mall

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Pelatihan Penanaman Toga dan Penataan Taman Toga / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



17 Juli 2024 di Balai Kelurahan Pekunden

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Rakor Sistem Informasi Gender dan Anak / Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota



25 Januari 2024 di Ruang Rapat DP3A Kota Semarang

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Penguatan Media SAPA (Sayang Perempuan dan Anak) dalam Pemberitaan yang Responsif Gender / Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota



2 Desember 2024 di Rumah Makan Joglo Besan

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Pengembangan SRA di Madrasah (Penguatan Sekber SRA) / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota



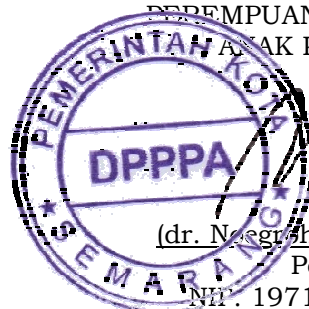
10 Oktober 2024 di Ruang Pertemuan Kecamatan Gajahmungkur

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Jambore Forum Anak / Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



10 Oktober 2024 di Ruang Pertemuan Kecamatan Gajahmungkur

Mengetahui dan menyetujui,
PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
BERKEMAMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SEMARANG



(dr. Negetho Edy Rijanto, M.Kes.)

Pembina Tk. I

NIP. 19711020 200212 1 006

FORMAT C

**PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2024**
(Bersumber dana APBN)

Penyelenggaraan urusan tugas pembantuan yang memuat :

- 1. Dasar Hukum : NIHIL
DIPA Nomor NIHIL
- 2. Instansi Pemberi Tugas : NIHIL
- 3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan : NIHIL
- 4. Program : NIHIL
Kegiatan : NIHIL
Sub Kegiatan : NIHIL
- 5. Anggaran : Rp..... NIHIL
- 6. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan : NIHIL
.....*diuraikan hasil pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan*....
- 7. Hambatan/ Permasalahan : NIHIL
- 8. Solusi / Rencana Tindak Lanjut : NIHIL

Masing - masing tugas dirinci sesuai format dibawah ini :

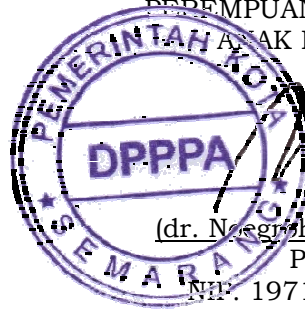
Tabel 1.

NO	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN					KET.
	NAMA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 2.

NO	PENYELENGGARAAN TUGAS TUGAS YANG DIPERBANTUKAN					KET.
	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mengetahui dan menyetujui,
 PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 KEEMPUNAN DAN PERLINDUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG



(dr. Negerho Edy Rijanto, M.Kes.)
 Pembina Tk. I
 NIP. 19711020 200212 1 006